

TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**Vera Finidia Indah¹, Siti Zubaidah², Delfiazi Puji Lestari³, Ade Uswatun
Hasanah⁴, Feni Huspita Sari⁵, Emilda Sinar Fatiha⁶, Basron⁷**

¹)STIE Aprin

²), ⁶), ⁷)STIA Bala Putra Dewa

³), ⁴), ⁵)STIA&P Annisa Dwi Salfarizi

Email Correspondence: verafinidiaindah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the challenges and obstacles in implementing the policy of forming a Strategic Plan Preparation Team (Renstra) at the Office of National Unity and Politics (Kesbangpol) Ogan Komering Ilir Regency (OKI). The Strategic Plan is a strategic planning document that plays an important role in supporting regional government policies in the field of national unity and politics. Using a descriptive qualitative approach, this research identifies various factors that influence the effectiveness of policy implementation. The problems of limited resources, weak coordination, and the low quality of Strategic Plan preparation are comprehensive strategic issues, thus the importance of this research. The methodology used in this research is descriptive qualitative, with observation, documentation and interviews. The research results show that limited resources, both human resources and budget, as well as weak coordination between institutions are the main obstacles in the implementation process. Apart from that, the low quality of analysis in preparing the Strategic Plan is a challenge that needs to be overcome. This research provides recommendations for improving resource allocation, strengthening cross-agency coordination, and improving the technical capacity of drafting teams so that policies can be implemented more effectively and produce quality planning documents.

Keywords: *Obstacles, Policy Implementation, OIC Kesbangpol, Strategic Plans, Challenges*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Permasalahan keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, dan rendahnya kualitas penyusunan Renstra menjadi isu strategis secara komprehensif, sehingga pentingnya riset ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi. Selain itu, rendahnya kualitas analisis dalam penyusunan Renstra menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan alokasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memperbaiki kapasitas teknis tim penyusun agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Kata kunci: *Hambatan, Implementasi Kebijakan, Kesbangpol OKI, Rencana Strategis, Tantangan.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh dunia menuntut adanya kebijakan publik yang efektif dan terencana, salah satunya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Renstra memiliki peran penting dalam menetapkan visi, misi, tujuan, serta strategi jangka menengah hingga jangka panjang suatu organisasi pemerintahan. Di era globalisasi ini, perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat menuntut adanya strategi yang adaptif agar pemerintahan dapat merespon tantangan tersebut secara efektif. Organisasi pemerintah di seluruh dunia semakin dituntut untuk memiliki rencana strategis yang dapat menjawab tuntutan global, termasuk dalam bidang keamanan nasional dan stabilitas politik (United Nations, 2021).

Di Indonesia, penyusunan Renstra telah menjadi elemen wajib dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Renstra merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan agar sejalan dengan visi dan misi nasional. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur secara jelas mengenai tata cara penyusunan Renstra di tingkat

pemerintah daerah. Renstra menjadi alat penting dalam memastikan bahwa program kerja pemerintah daerah, termasuk Kesbangpol, dapat berfungsi sesuai dengan tujuan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi lembaga pemerintahan dalam merencanakan dan mengarahkan program kerja serta kebijakan untuk mencapai tujuan jangka menengah hingga jangka panjang. Di tingkat pemerintahan daerah, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai program strategis yang sesuai dengan visi dan misi daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Bappenas, 2020). Renstra yang efektif diharapkan dapat mengarahkan kinerja organisasi pemerintahan untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi (Simatupang, 2016).

Penelitian tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra), telah banyak dibahas di berbagai negara dan konteks pemerintahan. Implementasi kebijakan diakui sebagai tahapan kritis yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, di mana pendekatan top-down sering digunakan sebagai kerangka kerja implementasi (Sabatier & Mazmanian, 1983). Di tingkat global, banyak penelitian menyoroti

pentingnya sumber daya, koordinasi, dan kapasitas organisasi dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (Grindle & Thomas, 1991; Edward III, 1980). Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi antar instansi, dukungan politik, dan keterlibatan stakeholder merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Meter & Horn, 1975).

Dalam konteks Indonesia, penyusunan Renstra di tingkat pemerintahan daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Namun, penelitian tentang implementasi kebijakan dalam penyusunan Renstra di tingkat daerah masih terbatas. Kebanyakan penelitian berfokus pada penyusunan Renstra di tingkat nasional atau pada instansi pemerintah pusat, sedangkan di tingkat daerah, terutama dalam konteks kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kajian implementasi kebijakan masih jarang dilakukan (Simatupang, 2016).

Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun Renstra di tingkat daerah adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengawasi stabilitas politik di daerah. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kesbangpol bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik melalui perumusan kebijakan strategis yang dituangkan

dalam Renstra. Penyusunan Renstra ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam Tim Penyusun Renstra yang dibentuk berdasarkan kebijakan dari Kepala Kesbangpol (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Namun, implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Berbagai literatur mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan antara aktor-aktor yang terlibat, serta masalah dalam koordinasi antar lembaga (Meter & Horn, 1975; Sabatier & Mazmanian, 1983). Dalam konteks ini, kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol OKI juga tidak luput dari permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas penyusunan dokumen Renstra tersebut.

Secara khusus, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Renstra memainkan peran vital dalam mendukung berbagai program daerah, termasuk dalam upaya menjaga kesatuan dan ketertiban politik. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten OKI bertugas untuk menyusun kebijakan strategis yang mampu mendukung stabilitas sosial-politik daerah ini. Dengan latar belakang masyarakat yang beragam secara budaya, bahasa, dan agama, Kabupaten OKI membutuhkan strategi yang komprehensif dan inklusif dalam menyusun kebijakan publiknya. Penyusunan Renstra Kesbangpol bertujuan untuk menetapkan langkah-

langkah yang akan diambil selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada penguatan ideologi kebangsaan, partisipasi masyarakat dalam politik, dan ketahanan sosial. Namun, proses penyusunan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak mencukupi, serta masalah koordinasi antar lembaga (Simatupang, 2016). Implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra menjadi penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan ini dapat disusun dengan baik dan mencerminkan kebutuhan serta potensi lokal OKI.

Faktor utama yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses perencanaan strategis. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai sering kali menyebabkan rendahnya kualitas perencanaan, serta terbatasnya kapasitas tim penyusun untuk menganalisis isu-isu strategis yang relevan (Edward III, 1980). Selain itu, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami kebijakan dan teknis perencanaan strategis juga menjadi kendala yang signifikan (Howlett & Ramesh, 1995).

Di samping itu, koordinasi yang lemah antar instansi dan pemangku kepentingan juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra. Menurut Grindle dan Thomas (1991), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik koordinasi antar aktor yang terlibat,

baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji implementasi kebijakan publik, ada beberapa kesenjangan yang signifikan terkait dengan pembentukan tim penyusun Renstra, terutama di lembaga-lembaga pemerintahan daerah seperti Kesbangpol:

1. **Kurangnya Fokus pada Konteks Daerah:** Sebagian besar penelitian tentang implementasi kebijakan masih berfokus pada tingkat pusat atau nasional, sementara penerapan kebijakan di tingkat daerah, khususnya di kantor Kesbangpol, belum banyak dikaji. Setiap daerah memiliki tantangan dan konteks yang unik, yang membutuhkan pendekatan khusus dalam implementasi kebijakan.
2. **Minimnya Penelitian Mengenai Hambatan dalam Implementasi:** Banyak literatur membahas faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi sedikit yang membahas secara mendalam tentang hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi dalam pembentukan tim penyusun Renstra di tingkat daerah. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas manusia, serta koordinasi antar lembaga belum diteliti secara detail dalam konteks Kesbangpol.
3. **Keterbatasan Penelitian Empiris tentang Kesbangpol:** Kesbangpol, sebagai instansi strategis dalam menjaga stabilitas politik dan

kesatuan bangsa, belum banyak menjadi fokus kajian akademik terkait perencanaan strategis dan implementasi kebijakan. Kebijakan di Kesbangpol sangat spesifik dan memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan instansi lainnya, namun belum banyak dieksplorasi secara empiris.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan yang penting dalam literatur terkait implementasi kebijakan publik, khususnya pada penyusunan Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir:

1. **Fokus Konteks Spesifik pada Kesbangpol:** Penelitian ini berfokus pada Kesbangpol, yang memiliki tugas unik dalam mengawal stabilitas politik dan menjaga kesatuan bangsa. Penelitian ini menjadi salah satu yang pertama mengkaji secara spesifik implementasi kebijakan penyusunan Renstra di instansi ini, yang memiliki peran strategis namun belum banyak diteliti.
2. **Pendekatan Daerah dan Faktor Lokal:** Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan di tingkat daerah dengan menyoroti dinamika lokal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi implementasi kebijakan di daerah, seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar instansi daerah, akan dianalisis secara komprehensif.
3. **Identifikasi Hambatan Spesifik:** Penelitian ini tidak hanya menilai faktor keberhasilan, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam

hambatan-hambatan spesifik yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pembentukan tim penyusun Renstra. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki kebijakan serupa di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru pada literatur kebijakan publik dengan mengidentifikasi tantangan spesifik dalam implementasi kebijakan di Kesbangpol dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyusunan Renstra di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyusunan Renstra di Kesbangpol.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pada level pemerintahan daerah ini menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas perencanaan strategis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kapasitas institusi pemerintahan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan fase penting dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan adalah proses dinamis di mana berbagai aktivitas dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan melalui tindakan administratif, hukum, dan operasional. Implementasi kebijakan melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, struktur organisasi, dan lingkungan sosial-politik yang mempengaruhi keberhasilannya. Sabatier dan Mazmanian (1983) menekankan bahwa faktor-faktor seperti kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan dari aktor-aktor kebijakan sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan yang menyoroti enam variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas.
2. Sumber daya yang mencukupi.
3. Hubungan antar organisasi yang efektif.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
6. Disposisi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan yang diimplementasikan dengan buruk sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak tersedianya sumber daya yang memadai, koordinasi yang lemah antar instansi, serta kurangnya pemahaman dari pelaksana kebijakan. Grindle dan Thomas (1991) menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan dinamika politik dalam implementasi kebijakan di negara-negara berkembang, di mana sering terjadi ketidakcocokan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan realitas di lapangan.

2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Pemerintahan

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi untuk memberikan arah kebijakan dan prioritas program yang akan dijalankan oleh organisasi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Renstra disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Nasional (RPJMN). Di Indonesia, penyusunan Renstra diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah daerah menyusun dokumen Renstra sebagai acuan perencanaan strategis (Kementerian Dalam Negeri, 2017).

Penyusunan Renstra yang baik bergantung pada proses perencanaan yang partisipatif dan komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didukung oleh analisis yang mendalam terhadap

kondisi internal dan eksternal organisasi. Simatupang (2016) menyatakan bahwa Renstra yang baik harus mencakup visi jangka panjang yang jelas, prioritas strategis yang dapat diukur, serta langkah-langkah implementasi yang realistis dan terukur. Namun, salah satu kendala utama dalam penyusunan Renstra adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga ahli yang kompeten.

3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Daerah

Implementasi kebijakan publik di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan di tingkat pusat. Edward III (1980) menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama adalah masalah koordinasi antar organisasi, di mana pelaksanaan kebijakan sering kali melibatkan berbagai lembaga dengan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Koordinasi yang lemah dapat mengakibatkan ketidaksepakatan antara pelaksana kebijakan, duplikasi program, dan pelaksanaan yang tidak efisien.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan di daerah. Di banyak daerah, kapasitas administratif sering kali rendah, yang berakibat pada rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (Howlett & Ramesh, 1995). Kesbangpol, sebagai instansi yang berperan dalam menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik, juga menghadapi tantangan yang sama dalam hal keterbatasan sumber daya, yang dapat mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan kebijakan penyusunan Renstra di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

4. Koordinasi dan Keterlibatan Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Koordinasi yang baik antar lembaga dan keterlibatan aktor-aktor yang relevan menjadi kunci sukses dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Grindle dan Thomas (1991), koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas institusional.

Selain itu, keterlibatan aktor-aktor lokal, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan konteks lokal. Kesbangpol di Kabupaten OKI, misalnya, harus melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra agar kebijakan tersebut dapat diterima dan didukung oleh masyarakat serta lembaga-lembaga terkait di daerah tersebut (Meter & Horn, 1975).

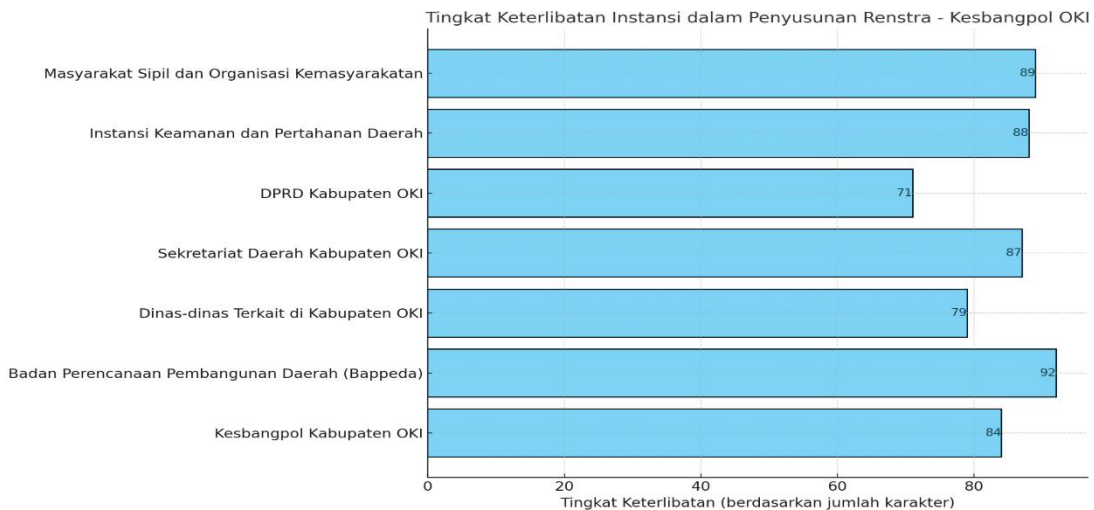
Dari tinjauan literatur di atas, jelas bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pembentukan tim penyusun Renstra, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kejelasan kebijakan, sumber daya yang

memadai, koordinasi antar lembaga, dan keterlibatan aktor lokal. Di tingkat daerah, seperti di Kesbangpol Kabupaten OKI, tantangan implementasi kebijakan sering kali terkait dengan keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengeksplorasi

hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyusunan Renstra di tingkat daerah.

Adapun tingkat keterlibatan instansi dalam Renstra Kesbangpol OKI, dapat dilihat pada tabel grafik horizontal dibawah ini:

Grafik 1. Tingkat Keterlibatan dalam Penyusunan Renstra di Kesbangpol OKI



Berdasarkan grafik batang horizontal yang menampilkan tingkat keterlibatan berbagai instansi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- Bappeda memiliki keterlibatan yang paling tinggi dalam penyusunan Renstra, dengan nilai 92. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda memainkan peran yang sangat krusial dalam penyediaan data, sinkronisasi kebijakan, dan integrasi antara Renstra

Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Kesbangpol selaras dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

2. Masyarakat Sipil dan Organisasi Kemasyarakatan

- Keterlibatan masyarakat sipil juga cukup signifikan, dengan nilai 89. Ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait isu-isu sosial dan politik yang dihadapi di tingkat lokal. Keterlibatan ini krusial untuk

memastikan bahwa Renstra yang disusun mencerminkan aspirasi masyarakat dan relevan dengan kebutuhan lokal.

3. **Instansi Keamanan dan Pertahanan Daerah**

- o Instansi keamanan dan pertahanan, seperti Kepolisian dan TNI, juga memiliki peran yang besar dengan skor keterlibatan sebesar 88. Ini menunjukkan pentingnya data dan informasi terkait stabilitas keamanan yang diberikan oleh instansi keamanan dalam penyusunan Renstra. Peran mereka adalah memastikan bahwa strategi yang disusun oleh Kesbangpol mampu menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

4. **Sekretariat Daerah Kabupaten OKI**

- o Sekretariat Daerah (Setda) juga terlibat secara signifikan, dengan nilai keterlibatan 87. Setda berperan dalam mendukung penyusunan Renstra dari sisi administratif dan politik, memastikan bahwa dokumen Renstra disetujui oleh bupati dan pemerintah daerah. Ini juga mencakup fungsi koordinasi administratif yang penting.

5. **Dinas-Dinas Terkait di Kabupaten OKI**

- o Dinas-dinas lain di Kabupaten OKI, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lain-lain, memiliki tingkat keterlibatan sebesar 79.

Mereka menyediakan data sektoral dan masukan yang berperan dalam membantu Kesbangpol merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan terintegrasi dengan program-program sektoral di daerah.

6. **Kesbangpol Kabupaten OKI**

- o Sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam penyusunan Renstra, Kesbangpol memiliki keterlibatan sebesar 84. Ini menunjukkan peran penting Kesbangpol dalam mengoordinasikan seluruh proses penyusunan, namun keterlibatan ini relatif lebih rendah dibandingkan Bappeda dan masyarakat sipil, yang menyoroti perlunya peningkatan dalam peran Kesbangpol untuk memimpin proses perencanaan dengan lebih efektif.

7. **DPRD Kabupaten OKI**

- o DPRD Kabupaten OKI memiliki keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan instansi lainnya, dengan nilai 71. Meskipun peran DPRD dalam pengawasan dan persetujuan anggaran sangat penting, data ini menunjukkan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan Renstra masih dapat ditingkatkan, terutama dalam memberikan masukan yang lebih substantif terkait kebijakan yang dirumuskan.

Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa Bappeda, masyarakat sipil, dan

instansi keamanan memainkan peran penting dalam penyusunan Renstra Kesbangpol. Namun, perlu ada peningkatan dalam keterlibatan DPRD untuk memastikan proses perencanaan yang lebih holistik. Koordinasi yang kuat antara Kesbangpol dengan instansi-instansi lainnya juga harus terus diperkuat, terutama dengan Setda dan dinas-dinas terkait, untuk memastikan Renstra yang dihasilkan dapat mengakomodasi semua isu strategis di Kabupaten OKI.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang bersifat kompleks dan dinamis, terutama dalam konteks kebijakan publik di pemerintahan daerah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra diimplementasikan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif realitas lapangan terkait implementasi kebijakan di Kesbangpol OKI.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a) Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI, serta aktor-aktor yang terkait dalam implementasi kebijakan.

b) Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol, serta literatur dan penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan dan perencanaan strategis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara Mendalam: Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pandangan langsung dari para informan terkait implementasi kebijakan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Renstra. Wawancara dilakukan dengan pejabat Kesbangpol, anggota tim penyusun Renstra, serta pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Kabupaten OKI.

b) Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder melalui dokumen resmi, laporan tahunan, serta kajian kebijakan yang relevan digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konteks implementasi kebijakan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik,

di mana data wawancara dan dokumentasi dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang muncul terkait tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Proses analisis ini meliputi langkah-langkah berikut:

- a) **Reduksi Data:**
Mengelompokkan data yang relevan dan membuang data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian.
- b) **Kategorisasi Tema:**
Mengidentifikasi dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti sumber daya, koordinasi, dan kapasitas teknis.
- c) **Penarikan Kesimpulan:**
Setelah data dikelompokkan berdasarkan tema, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa depan.

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, dokumen resmi, dan literatur) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan memastikan konsistensi data.

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Tim Penyusun Renstra

Kesbangpol Kabupaten OKI serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Lokasi ini dipilih karena relevansi Kesbangpol dalam menyusun kebijakan strategis untuk mendukung stabilitas politik dan kesatuan bangsa di daerah tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI

Implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan langkah penting dalam memastikan penyusunan dokumen perencanaan yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Renstra berperan sebagai acuan jangka menengah yang mencakup visi, misi, serta tujuan organisasi, termasuk di dalamnya program-program strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.

Pembentukan tim penyusun Renstra di Kesbangpol OKI dilakukan berdasarkan arahan dari regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Namun,

meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyusunan dokumen tersebut. Tantangan-tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta kualitas analisis yang belum memadai dalam penyusunan Renstra.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tim Penyusun Renstra dibentuk berdasarkan arahan dari pimpinan Kesbangpol dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Namun, hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal. Meskipun pembentukan tim telah sesuai dengan regulasi, pelaksanaan tugas-tugas tim dalam menyusun dokumen Renstra masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas dan efektivitas dokumen tersebut.

2. Tantangan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI adalah keterbatasan sumber daya. Dari segi sumber daya manusia, banyak anggota tim yang tidak memiliki latar

belakang atau pengalaman yang memadai dalam perencanaan strategis. Mereka juga kurang mendapat pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Selain itu, alokasi anggaran untuk mendukung proses penyusunan Renstra juga terbatas. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan pendukung, seperti rapat koordinasi, pengumpulan data yang komprehensif, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Akibatnya, dokumen Renstra yang dihasilkan sering kali tidak komprehensif, karena keterbatasan data yang tersedia dan kurangnya kajian mendalam terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu hambatan terbesar yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra. Kesbangpol Kabupaten OKI mengalami kekurangan staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam perencanaan strategis. Sebagian besar anggota tim penyusun Renstra belum memiliki pelatihan yang cukup terkait teknik perencanaan dan analisis strategis, sehingga proses penyusunan dokumen sering kali tidak maksimal.

Selain itu, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penyusunan Renstra juga terbatas. Minimnya anggaran menyebabkan tim penyusun kesulitan untuk mengadakan kegiatan pendukung seperti rapat koordinasi, konsultasi dengan pihak eksternal, atau pengadaan sumber daya teknis lainnya yang diperlukan dalam

proses perencanaan. Hal ini berakibat pada kurangnya data dan informasi yang mendalam dalam penyusunan Renstra, sehingga dokumen yang dihasilkan kurang komprehensif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan strategis daerah.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Idealnya, penyusunan Renstra Kesbangpol memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai instansi lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas-dinas terkait. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga di Kabupaten OKI masih belum optimal.

Koordinasi yang lemah mengakibatkan minimnya sinkronisasi antara perencanaan strategis Kesbangpol dan program-program strategis daerah secara keseluruhan. Misalnya, Kesbangpol sering kali kesulitan mendapatkan data yang relevan dari dinas-dinas terkait, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas perencanaan yang dilakukan. Ketidakteraturan dalam berkomunikasi dan kurangnya kerangka koordinasi yang jelas menyebabkan proses penyusunan Renstra berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang baik dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Kesbangpol dan instansi lain,

seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas-dinas terkait, belum optimal. Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan kesulitan dalam sinkronisasi data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

Menurut informan, tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur menyebabkan penyusunan Renstra berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan masukan dari sektor lain yang relevan. Hal ini berdampak pada kurangnya integrasi antara rencana strategis Kesbangpol dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Misalnya, dalam hal kebijakan ketahanan politik dan pengawasan ideologi, tim penyusun kesulitan mendapatkan data terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat karena kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait.

Dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terdapat beberapa instansi yang terkait dan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proses perencanaan strategis ini. Berikut adalah instansi-instansi yang terkait:

4. Kualitas Analisis dalam Penyusunan Renstra

Kualitas analisis dalam penyusunan Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI juga menjadi isu utama. Berdasarkan hasil penelitian, dokumen Renstra yang dihasilkan belum mampu memberikan gambaran strategis yang komprehensif mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam

menjaga stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas analisis ini adalah keterbatasan data yang digunakan dalam proses perencanaan. Tim penyusun sering kali tidak memiliki akses ke data yang lengkap dan akurat, sehingga analisis yang dilakukan menjadi parsial dan kurang mendalam. Selain itu, minimnya pemahaman tim penyusun mengenai teknik-teknik analisis strategis juga berkontribusi terhadap kurangnya kualitas dokumen. Hal ini menyebabkan dokumen Renstra yang dihasilkan kurang mampu memberikan solusi yang tepat terhadap isu-isu strategis di Kabupaten OKI.

Kualitas dokumen Renstra yang dihasilkan oleh Kesbangpol Kabupaten OKI masih dianggap kurang memadai. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kualitas analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen. Informan dari tim penyusun mengakui bahwa mereka sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal data dan informasi yang tersedia. Data yang digunakan dalam perencanaan sering kali bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mengakibatkan analisis situasi dan perumusan strategi menjadi kurang akurat.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa tim penyusun belum sepenuhnya memahami teknik-teknik analisis strategis yang diperlukan untuk menyusun Renstra secara efektif. Sebagai akibatnya, Renstra yang dihasilkan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten OKI, khususnya dalam bidang

kesatuan bangsa dan stabilitas politik. Hal ini berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak optimal dalam mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

5. Hambatan dalam Pemantauan dan Evaluasi

Salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI adalah kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur. Pemantauan terhadap kinerja tim penyusun serta evaluasi terhadap hasil Renstra belum dilakukan secara berkala. Akibatnya, kesalahan atau kekurangan dalam proses penyusunan Renstra sering kali tidak teridentifikasi sejak dini, sehingga sulit untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, di Kabupaten OKI, kurangnya evaluasi menyebabkan tim penyusun tidak mendapatkan umpan balik yang cukup untuk meningkatkan kualitas dokumen Renstra mereka. Akibatnya, banyak permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya solusi yang signifikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra adalah kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur. Pemantauan terhadap kinerja tim penyusun dan efektivitas pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara berkala. Akibatnya, kesalahan dan kekurangan

yang terjadi dalam proses penyusunan dokumen tidak segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Menurut informan, pemantauan yang lebih ketat dan evaluasi yang rutin dapat membantu meningkatkan kualitas Renstra yang disusun. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, tim penyusun dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif mengenai proses perencanaan yang sedang berlangsung, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang lemah, kualitas analisis yang rendah, serta kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif, peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan penyusunan, serta perbaikan dalam sistem koordinasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, serta kualitas analisis yang rendah. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa implementasi

kebijakan publik sering kali terhambat oleh masalah sumber daya dan koordinasi (Edward III, 1980; Grindle & Thomas, 1991).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif terkait perencanaan strategis. Selain itu, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan penyusunan Renstra. Koordinasi antar instansi pemerintah juga harus diperkuat dengan membentuk mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kualitas analisis dalam penyusunan Renstra dapat ditingkatkan dengan penggunaan data yang lebih komprehensif dan penerapan teknik analisis strategis yang lebih mendalam. Pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta rendahnya kualitas analisis dalam penyusunan Renstra. Tantangan-tantangan tersebut

berdampak pada efektivitas penyusunan dokumen strategis yang seharusnya menjadi panduan utama dalam perencanaan jangka menengah di Kesbangpol.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi perencanaan strategis, menghambat proses penyusunan Renstra yang komprehensif. Kedua, alokasi anggaran yang tidak memadai membatasi kemampuan Kesbangpol untuk melakukan kegiatan pendukung yang diperlukan, seperti pengumpulan data yang mendalam dan konsultasi lintas sektor. Ketiga, koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas-dinas terkait, belum berjalan optimal, yang mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan strategis. Terakhir, rendahnya kualitas analisis dalam Renstra disebabkan oleh minimnya data yang akurat dan komprehensif, serta kurangnya pemahaman terhadap teknik-teknik analisis strategis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun Renstra di Kesbangpol Kabupaten OKI adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Disarankan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala kepada anggota tim penyusun Renstra agar mereka memiliki pemahaman

yang lebih baik tentang teknik perencanaan strategis dan analisis kebijakan.

- Kesbangpol dapat menjalin kemitraan dengan akademisi atau konsultan ahli dalam perencanaan strategis untuk memberikan bimbingan teknis yang diperlukan.

2. Optimalisasi Anggaran

- Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan penyusunan Renstra. Dana yang cukup akan memungkinkan Kesbangpol untuk melakukan pengumpulan data yang lebih baik dan mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
- Usaha untuk mendapatkan dukungan tambahan dari DPRD dalam hal alokasi anggaran juga perlu diperkuat dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya dokumen Renstra untuk pembangunan daerah.

3. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

- Perlu adanya pembentukan forum atau mekanisme koordinasi formal antara Kesbangpol dengan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi untuk memastikan sinkronisasi dalam perencanaan strategis.

- o Pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagi data antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempermudah akses terhadap informasi yang relevan.

4. **Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Ketat**

- o Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap proses penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem evaluasi yang lebih ketat juga dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan memungkinkan tim untuk melakukan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu.

5. **Perbaikan Kualitas Analisis dalam Penyusunan Renstra**

- o Diperlukan upaya untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan memperbaiki teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan Renstra. Penggunaan data yang lebih akurat akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu strategis yang dihadapi Kesbangpol.
- o Kesbangpol juga disarankan untuk lebih memanfaatkan perangkat lunak atau metode analisis yang lebih canggih dalam mengolah data dan menghasilkan kebijakan yang relevan serta aplikatif.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penyusunan Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinoleo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beata.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. (2020). *Rencana Strategis dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jayapura: Salemba Empat.
- Blau, P. M., & Meyer, M. W. (2004). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Bryant, C., & White, G. L. (1989). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LPES.
- Bungin, B. F. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Diah Febriana. (2017). *Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan*

- Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Johns Hopkins University Press.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI).
- Hagul, P. (1992). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Hetifah, S. J. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CDES.
- Koentjaraningrat. (1981). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Meter, D. S., & Horn, C. E. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, K. M. R. (2006). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Musa Hubeis, & Mukhammad Najib. (2014). *Manajemen Strategis dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, DC: World Bank.
- Nasikun. (1987). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ndraha, T. (1981). *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa di Berbagai Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan*

- Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perjanjian Daerah. (2001). Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Jakarta: RTI - USAID.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
<https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Research Triangle Institute. (2001). Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Jakarta: RTI - USAID.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2000). *Economics*. Sixteenth Edition, McGraw-Hill Book Company.
- Sedarmayanti. (2000). Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Esensial dan Aktual. Bandung: Mandar Maju.
- Stewart, A. M. (1998). Penerjemah Agus M. Hardjono. *Perfect Empowerment*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga.
- United Nations. (2021). *World Public Sector Report: Building Institutions for a Resilient Future*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yogi, S. (2005). *Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, Cetakan 1.